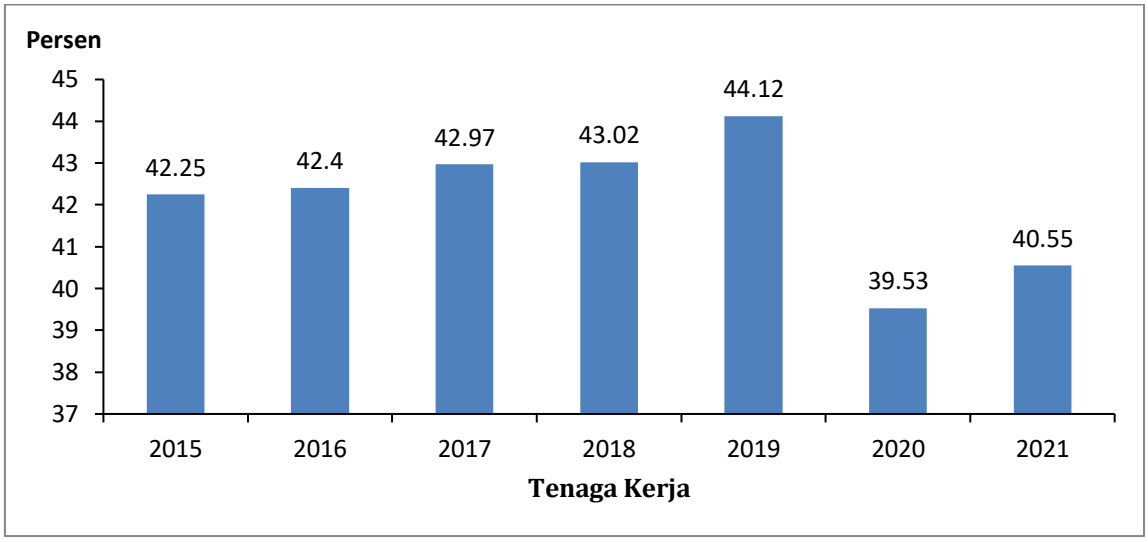
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Naiknya angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Keberhasilan progam pemerintah salah satunya dapat dilihat dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya.

Upaya yang dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai, diharapkan dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan ekonomi diperlukan kerja keras serta perjuangan yang tidak mudah. Hal tersebut membutuhkan kerja sama dengan semua pihak baik swasta, pemerintah maupun masyarakat dalam usia kerja yang mempunyai status sebagai sebagai pekerja atau bekerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan itu sendiri yaitu tenaga kerja (Sandika et al., 2014).

Berikut ini adalah perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2021.



Sumber : BPS Indonesia (2022)

Gambar 1.1
Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Formal Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa selama tahun 2015 hingga 2021 perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia mengalami fluktuasi, selama periode 2015 hingga 2019 penyerapan tenaga kerja Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata – rata peningkatan mencapai 42,95 persen. Tingginya penyerapan tenaga kerja menunjukkan semakin banyak perusahaan maupun swasta yang mampu menampung dan mempekerjakan para tenaga kerja, dan kondisi ini menjadi gambaran baik bagi perekonomian dikarenakan semakin banyak tenaga kerja yang terserap berarti semakin berkurang pengangguran yang ada di Indonesia.

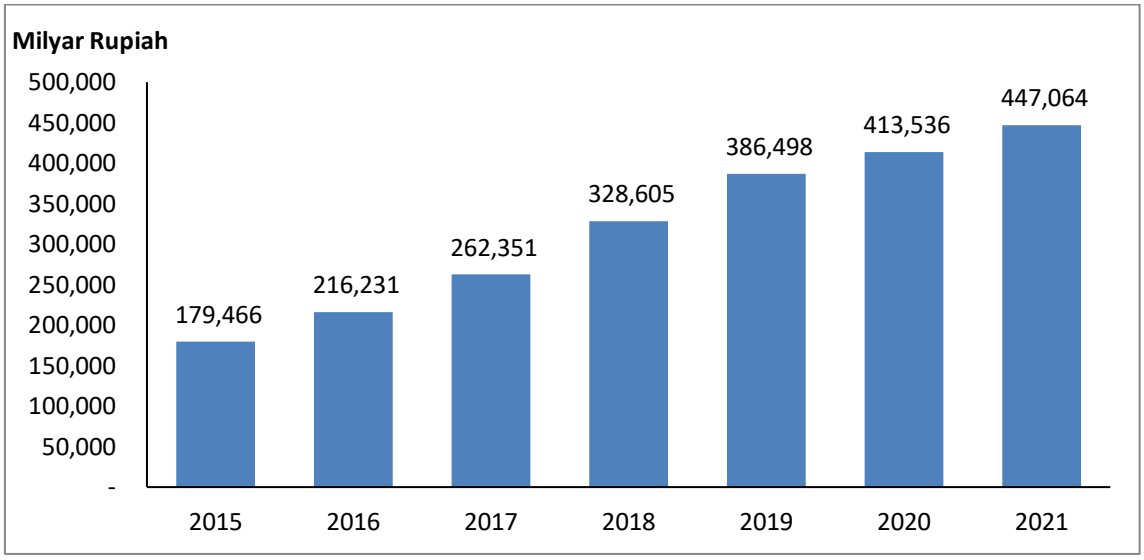
Namun di tahun 2020 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup besar dengan rata – rata sebesar 39,53 persen. Penurunan tenaga kerja yang cukup besar pada dua tahun sebelumnya diakibatkan oleh pandemi Covid -19 yang membuat banyak perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

Setelah kondisi covid – 19 yang terjadi di tahun 2020, indonesia mulai pulih dan dan membaik hal ini terlihat dari bertambahnya penyerapan tenaga kerja yang mencapai 40,55 persen pada tahun 2021. Salah satu yang mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja adalah stok Modal atau Investasi, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan Nasional.

Persoalan yang lebih lanjut adalah perlu diketahui seberapa jauh berubahnya kesempatan kerja akibat dari pertambahan jumlah investasi. Penyerapan tenaga kerja erat hubungannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kualitas sumberdaya manusia dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan investasi akan membuka atau memperluas kesempatan kerja. Sehingga akan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak (Sukirno, 2015).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial politik yang terjaga. Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi (Widjajanto & Agus, 2020).

Berikut adalah perkembangan investasi yang diukur dari penanaman modal dalam negeri di Indonesia selama tahun 2015 hingga 2021 yaitu sebagai berikut.



Sumber : BPS Indonesia (2022)

Gambar 1.2
Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat bahwa perkembangan investasi PMDN Indonesia terus tumbuh selama 7 tahun terakhir dengan sangat signifikan hal ini di lihat dari tahun 2015 sebesar Rp. 179.466 milyar lalu terus tumbuh hingga tahun 2021 manjadi Rp. 447.064 milyar dengan rata – rata laju pertumbuhan PMDN mencapai 3,19 persen.

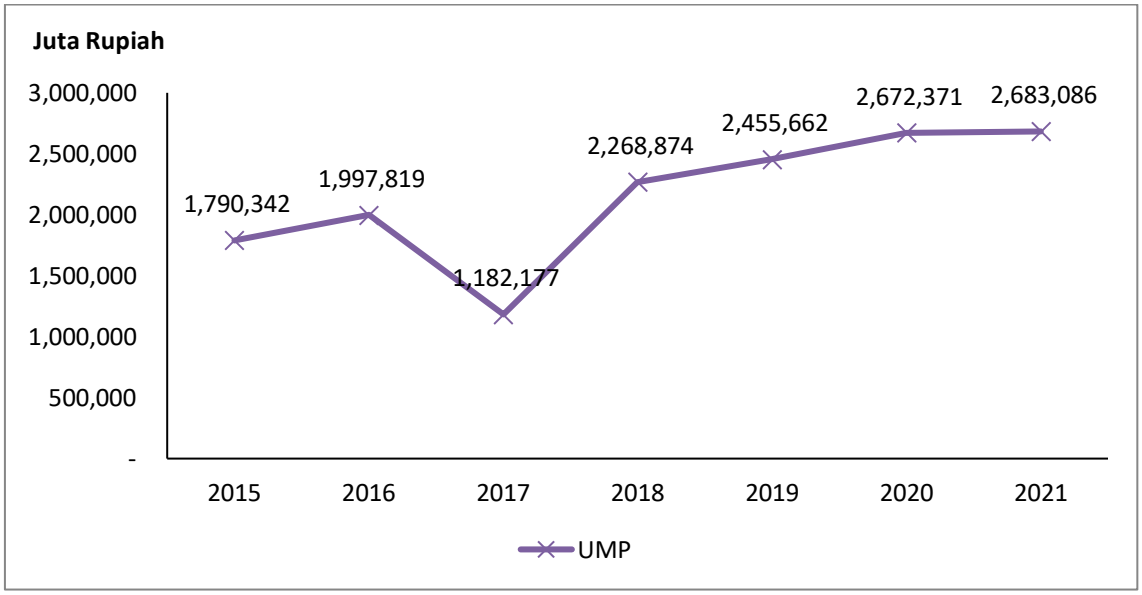
Beberapa provinsi yang tercatat memiliki nilai PMDN tertinggi diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Sedangkan wilayah pulau Sulawesi dan Kalimantan masih menjadi daerah dengan jumlah penanaman modal dalam negeri keci seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimatan Utara, dan Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut investasi yang banyak dilakukan berasal dari modal Asing (CNN Indonesia, 2021).

Faktor lain yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat.

Naiknya upah akan menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat, yang mana akan meningkatkan harga barang per-unitnya. Biasa nya akan cepat memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat komsumsi akan menurun sehingga banyak produksi yang tidak habis terjual karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk mengurangi jumlah produksinya (Wafin et al., 2022).

Dengan begitu maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik pengusaha akan lebih memilih menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin (Sumarsono, 2019).

Berikut perkembangan dari upah minimum provinsi di Indonesia yaitu sebagai berikut.



Sumber : BPS Indonesia (2022)

Gambar 1.3
Perkembangan Rata – Rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas terlihat bahwa perkembangan rata – rata upah di Indonesia terus mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2017 rata – rata upah sangat menurun hanya sebesar Rp. 1.182.177. Rendahnya upah sangat mempengaruhi kinerja pekerja, hal ini dikarenakan semakin rendah upah yang diterima pekerja membuat mereka kekurangan finansial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak dari pekerja yang memilih resgin atau mencari pekerjaan baru, sebaliknya semakin besar upah yang di terima seseorang akan membuat ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga dapat disisihkan untuk menabung, sehingga semakin semangat dalam bekerja dan memberikan kinerja baik bagi perusahaan.

Rendahnya UMP tahun 2017 tidak dapat di simpulkan bahwa Indonesia mengalami keterpurukan karena bisa saja terdapat beberapa provinsi yang memang

masih sangat rendah UMP, namun ada juga beberapa provinsi yang memiliki UMP besar meskipun sedang terjadi penurunan UMP.

Provinsi yang memiliki upah tertinggi selama 8 tahun diantaranya provinsi Jakarta dengan rata – rata UMP sebesar Rp 3.633.899, Papua sebesar Rp 2.920.033, Sulawesi Utara sebesar Rp 2.841.135, disusul Kabupaten Bangka Belitung sebesar Rp 2.772.283, Papua Barat sebesar Rp 2.703.094, Sulawesi Selatan sebear Rp 2.646.832 dan Aceh sebesar Rp 2.637.910. Sedangkan provinsi dengan rata – rata UMP rendah diantaranya Yogyakarta sebesar Rp 1.467.604, lalu Jawa Timur sebesar Rp 1.509.918, Jawa Barat sebesar Rp 1.643.437, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1.668.571, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 1.807.082, dan Bengkulu 1.884.479.

Fenomena menarik dalam penelitian ini dilihat dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di masing – masing provinsi Indonesia masih sangat bervariasi, ada beberapa provinsi yang tingkat penyerapan tenaga kerja sangat tinggi meskipun investasi dan upah yang di terima pekerja relatif kecil dan terdapat juga provinsi yang memiliki besar investasi namun masih sangat rendah perkembangan upah dan perekonomiannya sehingga membuat tenaga kerja sangat sedikit dapat terserap.

Novelty dalam penelitian ini adalah pengukuran penyerapan tenaga kerja menggunakan model data panel sehingga dapat di ketahui hasil dari setiap provinsi. Penelitian ini mengukur pengaruh investasi dan upah minimum provinsi pada 34 provinsi Indonesia sehingga hasil penelitian yang di peroleh diharapkan dapat lebih terperinci dan jelas sedangkan penelitian terdahulu hanya mengkaji pada satu wilayah atau region saja dan penggunaan model pada penelitian sebelumnya mayoritas